

Mutawasith

JURNAL

HUKUM

ISLAM

Vol. 3. No. 2 (2020) 07-12	E-ISSN: : 2723-4681	P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith		

Tinjauan Hukum Islam terhadap Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif al-Ghazali

Jamaludin

Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya, Indonesia

doktor_jamaludin@yahoo.com

Received:	Revised:	Published:
11-11-2020	16-11-2020	15-12-2020
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i2.235		

Abstract

This research aims to analyze the relationship between religion and country in the perspective of Islamic law. Among the scholars who are referenced in religious and state relations is al-Ghazali. His thoughts on the concept of religion and country are interesting to research. This research uses descriptive-qualitative methods in the form of library research. The results showed that between religion and state has a connection, so al-Ghazali analogizes religion and the king as 'two twins', of which religion is a foundation, while the king is the guardian. Something without a foundation will easily collapse and a foundation without guards will disappear. The existence of the king is a necessity for the order of the world, the order of the world is a necessity for religious order, and religious order is a necessity for the attainment of the welfare of the hereafter. Unequivocally, al-Ghazali said that a country that ignores morals (morals, ethics) will gradually suffer destruction or destruction. To that, al-Ghazali offers five ideal and moral conceptions of the state. The five conceptions are interdependence towards happiness, the fusion of science with religion and morals, moral-politics, the head of state who is sincere, and moral in international relations and deeds.

Keywords: Law, Islam, Religion, State, Ghazali

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan keterkaitan antara agama dan negara dalam perspektif hukum Islam. Diantara sosok ulama yang menjadi rujukan dalam relasi agama dan negara adalah al-Ghazali. Pemikirannya tentang konsep agama dan negara menarik untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif pendekatan library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi al-Ghazali, antara agama dan negara memiliki keterkaitan, sehingga al-Ghazali menganalogikan agama dan raja sebagai dua anak kembar, dimana agama adalah suatu pondasi, sedangkan raja adalah penjaganya. Sesuatu tanpa pondasi akan mudah runtuh dan suatu pondasi tanpa penjaga akan hilang. Keberadaan raja merupakan keharusan bagi ketertiban dunia, ketertiban dunia merupakan keharusan bagi ketertiban agama, dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akhirat nanti. Secara tegas, al-Ghazali mengatakan bahwa negara yang mengabaikan akhlak (moral, etika) lambat laun akan mengalami kehancuran atau

kemusnahan. Untuk itu, al-Ghazali menawarkan lima konsepsi negara yang ideal sekaligus bermoral. Kelima konsepsi tersebut adalah saling bergantung menuju kebahagiaan, perpaduan ilmu pengetahuan dengan agama dan akhlak, moral-politik, kepala negara yang berakhlak, dan akhlak di dalam hubungan dan perbuatan internasional.

Kata kunci: Hukum, Islam, Agama, Negara, Ghazali

PENDAHULUAN

Perbincangan seputar hubungan agama dengan negara (atau sebaliknya negara dengan agama) adalah sebuah kegiatan akademik klasik tetapi menarik, persoalan lama tetapi tetap mawacana. Meski telah menjadi subyek diskusi selama berabad-abad, seperti diakui oleh Nurcholish Madjid, persoalan tersebut tidak pernah terjawab secara tuntas. Apakah agama itu bagian integral dari negara atau sebaliknya negara adalah bagian dari dogma agama.

Sepanjang sejarah peradaban manusia, agama dan negara merupakan dua institusi yang sama-sama kuat berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Ajaran yang menyatakan berikan raja apa yang menjadi haknya dan gereja apa yang merupakan haknya, bisa dipahami sebagai fakta bahwa kuatnya pengaruh kedua institusi di atas. Terkait dengan persoalan ini, demi agama seseorang rela mengorbankan jiwa dan raganya. Demikian pula tidak jarang demi negara, seseorang tidak keberatan mengorbankan jiwa dan raganya. Konsep *syahid* dalam ajaran agama (baca: Islam) dan konsep pahlawan yang berkaitan dengan negara adalah cermin betapa dua institusi tersebut sama-sama mempunyai pengaruh yang demikian besar terhadap kehidupan umat manusia.¹

Keberadaan dua institusi agama dan negara, Kuntowijoyo dalam bukunya *Identitas Politik Umat Islam* mengatakan bahwa agama dan negara adalah dua satuan sejarah yang berbeda hakikat. Agama adalah kabar gembira dan peringatan (*basyiran wa nidziran*), sedangkan negara adalah kekuatan pemaksa (*coercion*). Agama punya *khatib*, juru dakwah dan ulama, sedangkan negara punya birokrasi, pengadilan dan tentara. Agama dapat mempengaruhi jalannya sejarah melalui kesadaran bersama (*collective conscience*), negara mempunyai pengaruh sejarah dengan keputusan, kekuasaan dan perang. Agama adalah kekuatan dari dalam dan negara adalah kekuatan dari luar.² Terkait dengan persoalan hubungan agama dengan negara, maka ada beberapa jenis pola hubungan dalam sejarah perjalanan manusia. **Pertama**, hubungan yang cenderung didasarkan atas *rivalitas* dan *antagonistik* di antara keduanya, dimana masing-masing berupaya untuk saling menghancurkan. **Kedua**, hubungan yang saling mendukung antara agama dan negara. Abdurrahman Wahid menyebutnya sebagai hubungan *simbiotik*.³ Sedangkan Eka Darmaputera menyebutnya sebagai hubungan *kolutif*.⁴

¹ Ahmad A. Sofyan and M. Roychan Madjid, "Gagasan Cak Nur Tentang Negara Dan Islam" (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), 12.

² Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), 191–92.

³ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama Dan Negara* (Jakarta: Grasindo, 1999), 112.

⁴ Eka Darmaputera, *Agama Dan Negara: Aspek Spiritual, Moral Dan Etika Dalam GBHN*, 1993, 102.

Dedi Ismatullah⁵ menegaskan bahwa kajian hubungan agama dan negara itu telah membidangi lahirnya empat aliran pemikiran. Keempat aliran pemikiran tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, teokrasi, yakni padangan yang menganggap atau menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara agama dan negara. Dengan kata lain, agama dan negara diyakini oleh aliran pemikiran ini sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Agama menyatu dengan negara karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman Tuhan. Segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Aliran ini pada perkembangannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu paham teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung. Paham yang pertama berpandangan bahwa pemerintahan diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan secara langsung. Adapun paham yang kedua meyakini bahwa yang memerintah pemerintahan dan negara bukanlah Tuhan sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Kepala Negara atau raja diyakini memerintah atas nama Tuhan.

Kedua, sekuleris, yaitu aliran pemikiran yang menganggap bahwa agama dan negara tidak memiliki hubungan satu sama lain. Artinya, paham ini memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam paham ini diyakini bahwa negara adalah murni urusan hubungan antara manusia dengan manusia lain, atau urusan duniawi, sedangkan agama adalah murni urusan hubungan manusia dengan Tuhan.

Ketiga, komunis, yaitu aliran pemikiran yang berpandangan bahwa hubungan agama dan negara berdasarkan pada filosofi *materialism-dialektis* dan *materialism-historis*. Dengan kata lain, paham aliran ini adalah sebuah paham yang meniadakan peran Tuhan.

Dan **keempat, moderasi**, yaitu aliran pemikiran yang lahir sebagai paham sintesis dari paham teokrasi dan sekuler. Paham ini beranggapan bahwa agama dan negara tidak memiliki hubungan seperti hubungan yang diyakini oleh aliran teokrasi. Paham ini juga tidak sepakat dengan paham sekuler yang memisahkan dan membedakan agama dengan negara. Paham moderasi berpandangan bahwa dalam agama terdapat nilai-nilai baik, seperti keadilan, moral dan sistem keteraturan. Sementara, negara memiliki sistem kekuatan untuk mengejawantahkan tujuan negara, seperti nilai kesejahteraan dan kenyamanan warga negara. Jadi, dari sudut pandang ini, hubungan antara negara dan agama dipertautkan oleh nilai dan sistem yang sama.

Menyadari juga bahwa upaya mengurangi tingkat intoleransi sosial agama bukan hanya tugas pemerintah dan pihak tertentu saja, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara sebagai manifesto kepatuhan terhadap amanat tahun 1945 untuk mengedepankan semangat persatuan bangsa. Selain itu, perlu juga dilakukan penelitian ilmiah terkait moderasi agama

⁵ Deddy Ismatullah and Asep A Syahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 181–83.

dari berbagai perspektif disiplin, memperluas makna toleransi melalui tradisi ilmiah adalah yang sistematis, metodis, terukur, filosofis, dan objektif.⁶ Atas dasar paradigam tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah melacak sekaligus mengeksplorasi pandangan hukum Islam terhadap hubungan antara agama dan negara dalam perspektif al-Ghazali.

METODE

Jenis dan Sifat Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang dibahas bersifat pemikiran dan mengupas tokoh dari pemikiran terkait, maka jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pemikiran yang dimaksud adalah konsep kepemimpinan ideal menurut al-Ghazali. Peneliti studi kajian pustaka library research dapat menggunakan atau memperoleh bahan dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer atau pustaka primer menurut Bakker, adalah karya tulis asli dari tokoh atau pribadi yang hendak diteliti. Adapun sumber data yang sekunder atau pustaka sekunder adalah monografi atau karangan yang membahas khusus tentang tokoh yang diteliti.⁷

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan cara atau teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi pada obyek penelitian sehingga dihasilkan data yang menggambarkan secara rinci. Sedangkan pendekatan deskriptif mengandung tujuan membuat deskripsi, lukisan atau gambaran secara akurat, sistematis, dan faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti atau diamati dari obyek atau sumber penelitian. Data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif deskriptif berupa kata lisan atau tulisan dari orang-orang atau tokoh serta perilaku yang diamati.⁸

Sumber Data

Yang termasuk sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab karya Imam al-Ghazali yang berhubungan dengan agama dan negara: *al-Iqtisād fī al 'Iṭiqād, at-Tibr al-Masbūk fi Nashīhat al-Mulūk, Iḥyā' Ulumi ad-Dīn, Ayyuhal Walad, al-Ma'arif al-Aqliyah* dan *Fadhā'ih al-Bātiniyyah wa Fadhā'il al-Mustazhiriyyah* yang dikenal juga dengan nama *al-Mustazhirī*. Sedangkan untuk sumber data sekunder ditambahkan setelah data data primer yaitu kitab-kitab lainnya karya Imam al-Ghazali, buku karya tokoh lainnya, karya ilmiah, jurnal, dan artikel yang memiliki korelasi dengan tema penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian studi kepustakaan (*library research*) ini adalah metode dokumentasi. Adapun Langkah langkah atau tahap pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk analisis deskriptif penelitian ini adalah mencari, membaca,

⁶ Muhamad Dani Somantri and Dahwadin, "THE MESSAGE OF RELIGIOUS MODERATION IN TANBIH QADIRIYAH NAQSYABANDIYAH (TQN) PONDOK PESANTREN SURYALAYA," *Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism* 8, no. 1 (2019): 53, <http://dx.doi.org/10.21580/tos.v8i1.4404>.

⁷ Anton Bakker and Zubaidi Zubaidi, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 63.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 4.

memahami dan mengumpulkan atau mencatat data dari sumber data baik primer maupun sekunder yang erat hubungannya dengan judul dan rumusan masalah penelitian.

Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskripsi kualitatif pada data pemikiran tokoh dengan menemukan dan mengungkap karakteristik pemikiran sang tokoh dan melihatnya berdasarkan dimensi suatu bidang keilmuan hingga ditemukan tema tertentu. Dimensi yang diangkat dalam penelitian ini adalah dimensi/bidang Hukum Islam, dengan topik utama berupa hubungan agama dan negara. Mencari hubungan logis antara pemikiran tokoh antar berbagai bidang hingga menemukan alasan logis dibalik pemikiran tokoh tersebut. Mencari generalisasi gagasan yang spesifik, sehingga studi pemikiran tokoh yang dilakukan memiliki keberlakuan yang cukup luas dalam bidangnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Agama dengan Negara: Perspektif Al-Ghazali

Teori kenegaraan al-Ghazali, menurut Munawir Sjadzali, dapat dipelajari terutama dari tiga karya tulisnya, yaitu *Ihya' Ulumuddin*, khususnya Kitab *al-Sya'ab*, *al-Iqtishat fi al-I'tiqad* (moderasi dalam Kepercayaan), dan *al-tibr al-masbuq fi nashihah al-mulk* (batangan logam mulia tentang nasihat untuk raja-raja). Tentang asal mula timbulnya negara, sebagaimana ilmuwan-ilmuwan politik sebelumnya, al-Ghazali juga berpendapat bahwa manusia itu makhluk sosial. Menurutnya, manusia diciptakan oleh Allah tidak bisa hidup seorang diri, ia butuh berkumpul bersama yang lain makhluk sejenisnya.⁹ Paling tidak ada dua faktor yang mengakibatkan manusia tidak bisa hidup sendirian. Kedua faktor itu adalah: pertama, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia; dan kedua, saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak.¹⁰

Menurut al-Ghazali, tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara sesungguhnya tidak semata-mata memenuhi kebutuhan biologis dan material, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sejahtera di akhirat nanti melalui pengalaman dan penghayatan ajaran agama secara benar. Hal demikian tidak mungkin tercapai tanpa keserasian kehidupan duniawi.¹¹ Bagi al-Ghazali, dunia adalah ladang untuk mengumpulkan perbekalan bagi kehidupan di akhirat nanti; dunia adalah wahana untuk mencari ridha Allah bagi mereka yang menganggapnya sebagai wahana serta jembatan, dan bukan tempat tinggal tetap dan terakhir; sedangkan pemanfaat dunia untuk tujuan ukhrawi itu hanya mungkin kalau terdapat ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan yang merata di dunia. Untuk itulah, menurut al-Ghazali, dibutuhkan seorang pemimpin dan pengelola negara yang dita'ati, yang mendistribusikan tugas dan tanggung jawab kepada

⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumu al-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), 174.

¹⁰ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 74.

¹¹ Ismatullah and Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, 24.

masing-masing warga negara, dan yang memilhkan bagi warga negara tugas yang paling sesuai bagi mereka masing-masing, dan mengelola segala urusan kenegaraan.¹²

Berdasarkan pemikiran itu, menurut al-Ghazali, kewajiban mengangkat seorang kepala negara atau pemimpin negara tidak berdasarkan rasio, tetapi berdasarkan keharusan agama. Hal ini disebabkan persiapan untuk kesejahteraan *ukhrawi* harus dilakukan melalui pengalaman dan penghayatan ajaran agama secara benar. Hal itu baru nyata dalam suasana dunia yang tertib, aman, dan tentram. Untuk itu, diperlukan pemimpin atau kepala negara yang ditaati. Dalam konteks ini, al-Ghazali menganalogikan agama dan raja sebagai dua anak kembar. Agama adalah suatu pondasi, sedangkan raja adalah penjaganya. Sesuatu tanpa pondasi akan mudah runtuh dan suatu pondasi tanpa penjaga akan hilang. Keberadaan raja merupakan keharusan bagi ketertiban dunia, ketertiban dunia merupakan keharusan bagi ketertiban agama, dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akhirat nanti.¹³

Dalam *Nashihat al-Mulk*, al-Ghazali, antara lain mengisyaratkan relasi paralel antara agama dan negara, seperti dicontohkan dalam paralelisme nabi dan raja. Menurut al-Ghazali, jika Tuhan telah mengirim nabi-nabi dan memberi mereka wahyu, maka Dia juga telah mengirim raja-raja dan memberi mereka kekuatan *illahi*. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu kemaslahan kehidupan manusia.¹⁴

Lebih lanjut, al-Ghazali menegaskan bahwa negara memerlukan sejumlah unsur yang menjamin tegaknya negara. Unsur-unsur dimaksud adalah pertanian, untuk menghasilkan bahan makan; penggembalaan, yaitu untuk menghasilkan binatang ternak; perburuan dan pertambangan, yaitu untuk menghasilkan binatang buruan dan barang tambang yang tersimpan di dalam perut bumi; pemintalan, yaitu untuk menghasilkan pakaian; pembangunan, yaitu untuk menghasilkan tempat tinggal; politik, yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan negara, pengaturan kerjasama antara warga negara untuk menjamin kepentingan bersama, menyelesaikan sengketa antarmereka dan melindungi ancaman dan bahaya dari luar.

Dalam bidang politik, menurut al-Ghazali, negara memerlukan beberapa hal, pertama, ahli pengukur tanah, untuk mengetahui ukuran tanah milik rakyat dan pembagian tanah secara adil; kedua, militer untuk memelihara keamanan dan pertahanan negara; ketiga, kehakiman untuk menyelesaikan perselisihan dan pertikaian anatarwarga negara; dan keempat, hukum, yaitu undang-undang yang memelihara moral masyarakat yang harus mereka patuhi agar tidak terjadi perselisihan dan pelanggaran hak, yaitu undang-undang

¹² Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 76.

¹³ Sjadzali, 76.

¹⁴ Din Syamsuddin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), 61–62.

syar'i di bidang muamalah. Untuk mengatur semua itu dibutuhkan seorang raja atau kepala negara yang bertugas mengelola segala urusan rakyat dan negara.

Kekuasaan kepala negara, sultan atau raja, menurut al-Ghazali tidak datang atau berasal dari rakyat seperti pendapat Al-Mawardi, tetapi dari Allah yang diberikan hanya kepada sejumlah kecil hamba pilihan tersebut yang disebut elit. Oleh sebab itu, kekuasaan kepala negara adalah *muqaddas* atau suci. Juga kepala negara adalah sebagai bayangan Allah di muka bumi. Untuk terpilih menjadi kepala negara atau raja, menurut al-Ghazali, setidaknya ada sepuluh syarat yang harus terpenuhi, yaitu: (1) dewasa atau akil *baligh*; (2) otak yang sehat; (3) merdeka dan bukan budak; (4) laki-laki; (5) keturunan Quraisy; (6) pendengaran dan penglihatan yang sehat; (7) kekuasaan yang nyata; (8) hidayah; (9) ilmu pengetahuan; dan (10) *wara`* (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).¹⁵

Lima Konsepsi Negara Bermoral Menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali menawarkan lima konsep dasar negara bermoral. Kelima konsep itu adalah: (1) saling bergantung menuju kebahagiaan; (2) perpaduan ilmu pengetahuan dengan agama dan akhlak; (3) moral politik; (4) kepala negara yang berakhlak; dan (5) akhlak di dalam hubungan dan perbuatan internasional. Dan kelima konsepsi negara bermoral tersebut dapat dilihat penjelasannya di bawah ini.

1. Saling Bergantung Menuju Kebahagiaan

Al-Ghazali dalam kitab *Ihya` Ulumuddin*, mengatakan bahwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah motif yang utama bagi manusia untuk hidup bergaul dan berhubungan antara satu dengan yang lain. Karena kebutuhan hidup yang berbagai ragam itulah yang menyebabkan manusia bukan hanya bergaul, tetapi bergantung keperluan yang satu kepada yang lainnya. Lebih lanjut, al-Ghazali mengatakan bahwa sesungguhnya manusia dijadikan tidaklah hidup sendirian tetapi sangat membutuhkan kepada hidup bergaul dan berkumpul bersama-sama dengan manusia lainnya karena dua sebab, yaitu pertama, dia membutuhkan keturunan untuk melanjutkan jenis manusia di dunia, dan ini memerlukan berkumpul dan bercampurnya jenis laki-laki dengan jenis perempuan; dan kedua, dia membutuhkan tolong menolong untuk menyediakan makanan, pakaian, dan pendidikan anaknya. Oleh sebab itu, tidaklah mungkin manusia hidup sendirian, karena dia sangat membutuhkan hidup bergaul dan berkumpul.¹⁶

Ada tiga unsur menurut al-Ghazali yang dinamakan dengan dunia, yaitu benda-benda yang ada, manusia mempunyai bahagian padanya, dan manusia bekerja untuk membangun benda-benda itu. Menurutnya, salahlah sangkaan orang yang terpengaruh oleh benda-benda

¹⁵ Ismatullah and Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, 25–26.

¹⁶ Zainal Abidin Ahmad, *KONSEPSI NEGARA BERMORAL Menurut IMAM AL GAZALI* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 25–26.

dunia (materi) saja, dan salah pula orang yang menganggap bahwa benda-benda itu adalah bagiannya sendiri saja, kalau tidak disertakan dengan hal yang ketiga, yaitu manusia itu harus bekerja untuk membangunnya, baik untuk kepentingannya, maupun untuk kepentingan bersama. Tetapi itupun belum cukup kalau manusia itu tidak menyadari tujuan yang dikejar dengan ketiganya itu, yaitu kebahagiaan.

Imam al-Ghazali mempunyai alasan yang cukup kuat dalam mengemukakan teorinya saling bergantung, yaitu firman Allah QS. Al-Ma'idah: 2, yang berbunyi:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya

Ayat di atas sejatinya mengandung perintah Allah untuk saling membantu atas kebajikan dan taqwa, karena adanya sifat bergantung antara satu dengan yang lain; dan sebaliknya dilarang bantu membantu atas kejahatan dan permusuhan, karena keduanya itu merusak semangat saling bergantung itu.

Selain berdasarkan ayat al-Qur'an, pun al-Ghazali mendasari teorinya itu dengan dua hadits Nabi SAW sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya *al-Ma'arif al-Aqliyah*. Kedua hadits itu yang artinya adalah manusia adalah bagaikan gigi-gigi sisir dalam persamaan dan seorang mu'min dengan mu'min lainnya adalah seumpama bangunan rumah yang kuat menguatkan satu dengan lainnya.

Teori saling bergantung al-Ghazali, pada perkembangan berikutnya diakui dan dinamakan *theory of interdependence*. Dan teori ini jauh lebih maju dari teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau pada 8 abad di belakang al-Ghazali. Dan teori Yunani tentang manusia adalah makhluk sosial yang terkenal dengan *the Aristotelian doctrine of the social nature* termasuk teori yang sudah jauh ketinggalan di belakang.

Teori *interdependence* al-Ghazali ini berkesimpulan bahwa bukan hanya bergaul, dan bukan sekedar adanya kontrak masyarakat, tetapi manusia itu adalah saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Ketergantungan ini bukan hanya pribadi dengan pribadi, tetapi juga satu negara dengan negara lainnya. Dan yang mendorong manusia itu hidup bergaul, adalah kebutuhan hidupnya yang harus setiap saat dan setiap hari diusahakan. Dan karena kebutuhan itu, dia bukan saja bergaul, malahan lebih erat lagi yaitu saling bergantung satu sama lain.

Ultimate goal dari teori saling ketergantungan al-Ghazali adalah bagaimana ketergantungan satu sama lain itu dapat melahirkan kebahagiaan yang lengkap. Inilah tujuan yang terakhir bagi manusia, dan untuk ini pula negara dibentuk sebagaimana terungkap dalam sebuah kata-kata populer, yaitu *The end of the state is happiness*. Dengan kata lain, tujuan negara adalah bahagia.

2. Perpaduan Ilmu Pengetahuan dengan Agama dan Moral (Akhlak)

Persoalan penting yang ditawarkan al-Ghazali adalah bagaimana pentingnya memadukan antara ilmu pengetahuan dengan agama dan moral. Persoalan ini bukan hanya penting untuk masing-masing manusia yang harus hidup bermodalkan pengetahuan itu, tetapi juga sangat diperlukan untuk negara yang didirikan bersama-sama oleh manusia itu.

Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul *Ayyuhal Walad*, mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa amal adalah gila, sedang amal tanpa ilmu tidaklah sah. Ilmu pengetahuan semata-mata tidaklah menjauhkan dari perbuatan dosa dan kejahatan, dan tidak pula mendekatkan kepada taat dan kebaikan sewaktu hidup di dunia ini. Sedangkan untuk akhirat ilmu itu tidak sanggup membebaskan manusia dari hukuman neraka.

Lebih lanjut, al-Ghazali menegaskan bahwa negara membutuhkan ilmu pengetahuan sejati yang memadukan tiga unsur utama, yaitu ilmu pengetahuan, agama dan akhlak. Manakala perpaduan ini diabaikan atau dilepaskan, sehingga ketiga unsur itu berantakan satu sama lain, maka akan menimbulkan bencana yang maha besar. Api bencana itu akan menjilat kian kemari bukan saja dapat membakar diri pribadi manusia, tetapi akan sanggup membakar seluruh negara, bahkan mungkin menjerumuskan seluruh dunia kepada kebakaran internasional.

3. Moral-Politik

Pendirian al-Ghazali adalah sejalan dengan pendapat filosof-filosof Yunani, seperti Plato dan Aristoteles yang mengatakan bahwa moral dan politik adalah dua saudara kembar yang tidak boleh dipisahkan. Dimana moral sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menentukan nilai baik dan buruk atau benar dan salah dari setiap tindakan dan keinginan setiap orang dalam masyarakat, sementara politik dibutuhkan untuk mengatur masyarakat itu sesuai dengan aturan-aturan moral yang diterima oleh anggota masyarakat. Namun demikian, menurut al-Ghazali, moral dan politik bukan saja saudara kembar yang tidak boleh dipisahkan, tetapi keduanya adalah satu yang tidak dapat dibagi. Al-Ghazali tidak bersedia menyebutkan moral dan politik, tetapi secara konsekwen dia mengatakan dengan satu kata majemuk yang senafas, yaitu moral-politik atau politik-moral, yang disebutkan dalam bahasa Arab *Siyaasatul Akhaq*.

Dengan keyakinan yang bulat, al-Ghazali menegaskan bahwa pendirian moral-politik atau politik-moral merupakan pendirian Islam, atau dengan perkataan lain dinamakan dengan ideologi Islam, dimana semua ajaran Islam diarahkan kepada pendirian ini, yaitu terwujudnya moral-politik dan tercapainya politik-moral. Atas dasar itulah, al-Ghazali

berkesimpulan bahwa negara memerlukan adanya moral-politik ataupun politik moral.¹⁷ Moral-politik yang dimaksud oleh al-Ghazali ialah moral yang berdasarkan kepada agama.

Moral-politik berdasarkan agama yang dikehendaki oleh al-Ghazali adalah berjiwakan tasawuf, yang dalam pengertian Barat dinamakan *mystic*. Al-Ghazali berkeyakinan bahwa setiap akhlak manusia, ---atau dinamakan moral ataupun etik--- adalah mempunyai sumber yang dalam di dalam jiwa manusia itu, yaitu hati, dan hati itu mempunyai dua pintu, yaitu: pertama, pintu luar yang menerima segala pengaruh luar dan yang mengeluarkan segala tindakan yang menentukan akhlak manusia; dan kedua, pintu dalam yang menerima wahyu -- -bagi setiap Nabi--- dan ilham ---bagi semua manusia lainnya--- dari Tuhan yang menuntun hidupnya, baik rohani maupun jasmani.

Pintu luar menerima segala petunjuk dari semua alam lahir, baik dengan melalui pendidikan, pergaulan, latihan maupun dengan melalui panca indera ditambah dengan indera yang keenam, yaitu akal fikiran. Ilmu yang berasal dari luaran ini dinamakan oleh al-Ghazali *ilmu mu'amalah*. Adapun pintu dalam dari hati menerima petunjuk dari suatu sumber yang bening, bersih tiada bandingan, yaitu wahyu atau ilham dari Tuhan. Ilmu yang kedua ini dinamakannya *ilmu mukasyafah*. Dan sumber yang bening ini tidaklah mungkin terbuka apabila belum melalui latihan (*riyadhah*) yang terus menerus. Menurutnya, hanya dengan memiliki kedua ilmu ini,---*ilmu muamalah* dan *ilmu mukasyafah*--- barulah hati manusia dapat mencapai dan memancarkan akhlak yang mulia sebagaimana telah diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Disinilah jiwa tasawuf dimasukan oleh al-Ghazali ke dalam moral-politik yang berdasarkan agama. Membawa hati ke dalam perjuangan politik disamping akal yang memberikan perhitungan yang teratur, adalah merupakan moral yang dimaksudkan oleh al-Ghazali. Dengan itulah, al-Ghazali dianggap seorang sufi-politikus, yaitu seorang politikus yang mendengar suara hatinya yang bersifat tasawuf atau mistik.¹⁸

4. Kepala Negara yang Berakhlak

Dalam kitabnya *al-Mustadzhiri*, al-Ghazali memperingatkan aspek-aspek keagamaan yang dapat dihubungkan kepada jabatan khalifah sebagai kepala negaras, bukan soal turunan, dan bukan pula soal "suci" tidaknya seorang kepala negara. Tetapi yang penting menjadi perhatian semua pihak, baik oleh calon kepala negara maupun oleh rakyat banyak, dan khususnya *ulil `amri* yang berhak melantik calon kepala negara adalah bagaimana menentukan format kriteria ideal seorang kepala negara.

Menurut al-Ghazali, paling tidak, ada dua kriteria penting yang harus mendapat perhatian, yaitu *wilayah ilmiyah* dan *wilayah amaliyah*.

- a. Wilayah *'Ilmiyah*, adalah wilayah utama yang harus mendapat perhatian istimewa, dimana menurut al-Ghazali wilayah ini terdiri dari 4 perhatian pokok, yaitu:

¹⁷ Ahmad, 160.

¹⁸ Ahmad, 169.

- 1) Harus disadari, bahwa manusia harus menyadari untuk apakah dan apa tujuan manusia hidup di dunia ini. Dunia ini bukanlah tempat menetap bagi manusia, tetapi merupakan tempat singgah baginya di dalam perjalanannya menuju kampung yang kekal abadi, yaitu akhirat.
 - 2) Harus diketahui, bahwa taqwa itu tempatnya di dalam hati. Baik kepala negara ataupun rakyat banyak harus mempunyai hati yang taqwa untuk menyelamatkan hidupnya di dunia, dan perjalanannya ke akhirat.
 - 3) Manusia adalah menjadi wakil Tuhan di dunia. Untuk membangun penduduk dunia, seorang kepala negara (wakil Tuhan) haruslah cukup kemampuan untuk membangun manusia seutuhnya, yang harus dimulainya dari diri sendiri, meningkat kepa keluarganya, terus kepada warganya dan kepada manusia sedunia.
 - 4) Harus diketahui bahwa manusia terdiri dari dua kekuatan, yaitu kekuatan suci malaikat dan kekuatan rendah hewan. Kekuatan suci malaikat menimbulkan akhlak yang baik, dan kekuatan rendah hewan menyeret kepada akhlak yang buruk.
- b. Wilayah *'Amaliyah*, adalah kriteria yang harus terimplementasi dalam perbuatan dan sikap hidup. Al-Ghazali, menyebutkan 11 sikap yang harus dimiliki oleh setiap kepala Negara, yaitu:
- 1) merasakan senang susah dan pahit getir kehidupan orang lain;
 - 2) harus dahaga kepada nasihat ulama dan cendikiawan;
 - 3) tidak boleh memandang rendah kepada orang-orang yang memerlukan bantuannya;
 - 4) harus menjauhi sifat royal dan hidup berpoya-poya;
 - 5) mempunyai kelonggaran waktu banyak untuk mengabdikan diri kepada Tuhan;
 - 6) harus lunak-lembut, jangan bertindak kasar kepada siapapun;
 - 7) mencari keridhaan rakyat dan kecintaan mereka, seuai dengan keridhaan Illahi;
 - 8) keridhaan rakyat harus dicari memenuhi ajaran agama, karena keta'atan kepada penguasa adalah selama penguasa itu berjalan menurut keridhaan Allah.
 - 9) harus disadari bahwa jabatan Kepala Negara adalah persoalan besar;
 - 10) para penguasa harus berdekatan dengan para ulama dan cendikiawan; dan
 - 11) para penguasa harus mementingkan sifat mema'afkan, menahan kemarahan dan lain sebagainya.
5. Akhlak dalam Hubungan dan Perbuatan Internasional

Sesungguhnya fungsi manusia mejadi wakil Tuhan kepada makhluk-Nya, berarti memperbaiki dan membangun manusia. Tidaklah kuat untuk membangun manusia di dunia ini orang yang tidak mampu memperbaiki warga negaranya. Dan tidaklah kuat untuk membangun warga negaranya orang yang tidak mampu memperbaiki rumahtangganya. Dan tidaklah kuat membangun rumah tangganya orang yang tidak mampu memperbaiki dirinya sendiri. Dan orang yang tidak kuat membangun dirinya, maka haruslah dimulainya dengan memperbaiki hatinya dan mengendalikan nafsunya. Adapun orang yang tidak mampu membangun dirinya sendiri sedangkan keinginannya besar untuk membangun orang lain, maka ia telah menipu diri.¹⁹

Pendapat al-Ghazali di atas menjadi landasan filosofi lahirnya sendi-sendi moral internasional. Sendi-sendi dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Perdamaian Dunia yang Abadi

Membuat perdamaian seorang demi seorang adalah menjadi sendi yang paling bawah bagi perdamaian dunia yang abadi. Tidaklah mungkin terjadi perdamaian dunia kalau negara dengan negara tidak damai, tidak mungkin negara damai kalau keluarga dengan keluarga tidak damai, dan akhirnya tidaklah mungkin perdamaian keluarga terjadi kalau tidak dibina terlebih dahulu perdamaian di dalam jiwa masing-masing pribadi. Secara tegas, al-Ghazali mengatakan bahwa pembinaan semangat perdamaian ini harus dilakukan dengan 'pendidikan' yang terus menerus dan merata, sehingga meresap ke dalam hati nurani setiap rakyat, terutama ke dalam hati nurani para penguasa negara, yang di dalam hakikatnya menjadi wakil mutlak dan penyambung lidah dari seluruh rakyat negaranya berhadapan dengan rakyat dan negara-negara lain dalam hubungan internasional.

b. Saling Menghormati Keyakinan Keagamaan dan Ideologi

Sikap saling menghormati terhadap keyakinan agama masing-masing inilah yang dijadikan sendi kedua oleh al-Ghazali bagi moral internasional.

c. Persaudaraan dan Persahabatan

Dalam pergaulan antarbangsa sangat dibutuhkan semangat persaudaraan dan persahabatan, seperti halnya dalam pergaulan manusia dalam hidupnya sehari-hari. Perasaan yang akrab tidak saling curiga mencurigai, tetapi sebaliknya saling memberikan kepercayaan antara suatu bangsa terhadap bangsa yang lainnya, adalah merupakan kebutuhan moral dalam hubungan internasional.

Selanjutnya, al-Ghazali menegaskan bahwa semangat persaudaraan dan persahabatan itu menimbulkan hak-hak timbal balik diantara pihak-pihak yang bersaudara dalam 8 hal. Kedelapan hal tersebut adalah:

- 1) bantu membantu dengan materi atau harta benda;
- 2) bantu membantu dengan diri, samapi kepada pengorbanan jiwa;
- 3) menyimpan segala rahasia sahabatnya dengan sikap diam;

¹⁹ Al-Ghazali, *Ihya` 'Ulumu al-Din*, 202–25.

- 4) membantu dengan lisan untuk membicarakan sesuatu yang diperlukan;
 - 5) mema'afkan segala kehilangan dan kesalahan;
 - 6) mendoakan keselamatan;
 - 7) berlaku jujur dan ikhlas; dan
 - 8) meringankan dan bukan memberatkan dan tidak pula menunjukkan keberatan
- d. Gotong Royong dalam Kebutuhan Ekonomi

Dalam kebutuhan ekonomi yang saling bergantung antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya itu atau suatu negara dengan negara lainnya itu memerlukan adanya semangat gotong royong yang dalam bahasa al-Ghazali disebut *ta'awun*, sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* Juz III pasal ke VI.

- e. Politik Bertetangga Baik dan Persenjataan yang Depensif

Seperti halnya hubungan antara manusia dengan manusia mempunyai pertalian tetangga karena berdekatan tempat tinggal, demikian pula halnya dengan hubungan negara dengan negara. Hubungan bertetangga itu menimbulkan hak yang harus dihormati. Masing-masing negara harus mengatur politik bertetangga baik terhadap negara-negara lainnya. Adapun dasarnya politik bertetangga baik itu, menurut al-Ghazali adalah persaudaraan dan persahabatan. Oleh sebab itu, tidaklah pada tempatnya bagi sifat-sifat ketakutan dan iri hati, apalagi sifat mengganggu dan menyerang negara lain demi mencari keuntungan sendiri.

Melalui faham inilah diletakkan pengertian perang. Peperangan tidak boleh bersifat agresif dan permusuhan, tetapi peperangan haruslah sekedar untuk *defensive* dan pembelaan. Al-Ghazali menganggap bahwa peperangan hanyalah suatu ikhtiar untuk mempertahankan persahabatan dan persaudaraan dari gangguan negara-negara yang agresif, dan untuk memulihkan kembali politik bertetangga baik.

Berdasarkan pendapat itulah, maka al-Ghazali mempersatukan politik bertetangga baik dengan prinsip persenjataan yang depensif. Setiap Negara janganlah membuat senjata yang sifatnya agresif, yang digunakan untuk menyerang secara ganas atas negara lainnya. Janganlah dijadikan persenjataan itu untuk perlombaan yang jahat, untuk mencari keunggulan atau karena didorong oleh ketakutan atau kecurigaan.

Menghapuskan peperangan sama sekali dan melucuti persenjataan suatu negara secara total, menurut al-Ghazali adalah suatu hal yang mustahil, selama manusia masih bersifat manusia, mempunyai sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk. Tetapi peperangan dan persenjataan itu hanyalah dapat dibendung, dikurangi dan dibatasi, kalau masing-masing negara menganut politik bertetangga baik di atas dasar persaudaraan dan persahabatan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa bagi al-Ghazali, relasi antara agama dan negara memiliki keterkaitan yang sangat signifikan, sehingga al-Ghazali menganalogikan agama dan raja sebagai dua anak kembar, dimana agama adalah suatu pondasi, sedangkan

raja adalah penjaganya. Sesuatu tanpa pondasi akan mudah runtuh dan suatu pondasi tanpa penjaga akan hilang. Keberadaan raja merupakan keharusan bagi ketertiban dunia, ketertiban dunia merupakan keharusan bagi ketertiban agama, dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akhirat nanti. Secara tegas, al-Ghazali mengatakan bahwa negara yang mengabaikan akhlak (moral, etika) lambat laun akan mengalami kehancuran atau kemusnahan. Untuk itu, Al-Ghazali menawarkan lima konsepsi negara yang ideal, yaitu negara bermoral. Kelima konsepsi tersebut adalah saling bergantung menuju kebahagiaan, perpaduan ilmu pengetahuan dengan agama dan akhlak, moral-politik, Kepala Negara yang berakhlak, dan akhlak di dalam hubungan dan perbuatan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin. *KONSEPSI NEGARA BERMORAL Menurut IMAM AL GAZALI*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya` 'Ulumu al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr, 1975.
- Bakker, Anton, and Zubaidi Zubaidi. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Darmaputera, Eka. *Agama Dan Negara: Aspek Spiritual, Moral Dan Etika Dalam GBHN*, 1993.
- Ismatullah, Deddy, and Asep A Syahid Gatara. *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sofyan, Ahmad A., and M. Roychan Madjid. "Gagasan Cak Nur Tentang Negara Dan Islam." Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003.
- Somantri, Muhamad Dani, and Dahwadin. "THE MESSAGE OF RELIGIOUS MODERATION IN TANBIH QADIRIYAH NAQSYABANDIYAH (TQN) PONDOK PESANTREN SURYALAYA." *Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism* 8, no. 1 (2019). <http://dx.doi.org/10.21580/tos.v8i1.4404>.
- Syamsuddin, Din. *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Wahid, Abdurraman. *Mengurai Hubungan Agama Dan Negara*. Jakarta: Grasindo, 1999.

